



KUA-PPAS BUSEL BERUBAH, BUTON SELATAN REVISI ANGGARAN 2026,

PENDAPATAN
Rp532,8 MILIAR

BELANJA
Rp576,3 MILIAR

DEFISIT ANGGARAN **Rp43,5 MILIAR**



Belanja daerah 2026: Rp576,381 miliar, lebih besar dari pendapatan Rp532,865 miliar.



Defisit anggaran Rp43,5 miliar akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah Rp43,515 miliar. Pengeluaran pembiayaan: nihil.



Pembahasan bersama TAPD, Badan Anggaran DPRD, dan komisi-komisi terkait.



Perubahan KUA-PPAS untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dan mendukung program prioritas yang berdampak bagi masyarakat.



Hasil pembahasan akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama sebagai dasar perubahan APBD 2026.

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) mengusulkan perubahan struktur anggaran 2026 dengan belanja daerah sebesar Rp576,381 miliar. Anggaran tersebut lebih besar dibandingkan target pendapatan yang dipatok Rp532,865 miliar sehingga menciptakan defisit Rp43,5 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp43,515 miliar.

Rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 itu mulai dibahas pemerintah daerah bersama DPRD

Busel melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Buton Selatan, Batauga, Senin (31/8/2026). Pengeluaran pembiayaan dalam rancangan tersebut tercatat nihil.

Bupati Buton Se-

latan H. Muhammad Adios mengatakan perubahan KUA-PPAS diperlukan untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pemba-

ngunan selama tahun berjalan. Pemerintah daerah, kata dia, akan mengarahkan kembali alokasi anggaran agar program prioritas tetap berjalan secara efektif.

“Penyusunan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 ini merupakan langkah strategis untuk merespons dinamika pembangunan yang sangat dinamis. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar

memberikan dampak langsung (outcome) bagi kesejahteraan masyarakat Buton Selatan,” kata Adios.

Menurut Adios, penyesuaian anggaran juga ditujukan untuk mengakomodasi program-program yang dinilai mendasak dan strategis. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berlangsung efisien,

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Tengah Azhari Siapkan Rp4,7 Miliar untuk Jalan Poros Mawasangka-Wasilomata



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan rusak pada 2026 dengan menggabungkan pembiayaan APBD dan dukungan

pemerintah pusat. Kebijakan itu ditempuh karena kemampuan fiskal daerah masih terbatas untuk membiayai perbaikan jalan dalam skala besar, sementara kebutuhan

Lanjut ke Hal: 7

Pelabuhan Ferry Batu Atas Disiapkan, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Janjikan Konektivitas Tiga Provinsi



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyiapkan pembangunan Pelabuhan Ferry Batu Atas yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027. Pelabuhan tersebut dirancang membuka konektivitas Pu-

lau Batu Atas dengan wilayah di tiga provinsi sekaligus menjadi bagian dari penguatan infrastruktur kawasan kepulauan.

Rencana itu disampaikan Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., MBA., saat melaku-

Lanjut ke Hal: 7

Festival Marching Band 2026 Resmi Dibuka, Wawali Baubau Tekankan Karakter



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau mendorong Festival Marching Band Tahun 2026 tidak berhenti sebagai kompetisi musik

dan baris-berbaris, tetapi menjadi ruang pembentukan karakter generasi muda. Pesan itu disampaikan Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.,

saat membuka festival di Lapangan Lembah Hijau, Kota Baubau, Selasa (1/9/2026).

Menurut Hamsinah, keberanian tampil, kedisiplinan berlatih, kemampuan beker-

ja dalam tim, serta sikap menghargai peserta lain merupakan nilai yang lebih penting daripada sekadar mengejar gelar juara.

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Sekatan H Muh Adios Pacu Ekonomi Nelayan, KNMP Rp5 Miliar Dibangun di Batu Atas



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mulai membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Pulau Batu

Atas dengan dukungan anggaran sekitar Rp5 miliar. Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., MBA., menandai dimulainya pembangunan tersebut melalui pele-

takan batu pertama di Dusun Liwu, Kecamatan Batu Atas, Selasa (1/9/2026).

Kawasan KNMP itu mencakup Desa

Lanjut ke Hal: 7

KUA-PPAS Busel Berubah, Buton Selatan Revisi Anggaran 2026, Pendapatan Rp532,8 Miliar dan Belanja Rp576,3 Miliar, Defisit Anggaran Rp43,5 Miliar

paran, akuntabel, serta berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.

Pembahasan perubahan KUA-PPAS selanjutnya dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran DPRD, dan komisi-komisi terkait. Adios berharap proses tersebut tetap ditopang kemitraan eksekutif-legislatif sehingga setiap perubahan kebijakan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Secara nasional, mekanisme perubahan anggaran daerah merupakan bagian dari tata kelola keuangan negara yang terus diperkuat sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan

daerah kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, termasuk mengenai penyusunan dan perubahan APBD serta mekanisme pembiayaan daerah.

Dalam perkembangan global, keterbukaan anggaran juga menjadi bagian penting tata kelola fiskal. Dana Moneter Internasional (IMF) menempatkan transparansi fiskal sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan membantu pemerintah mengambil keputusan berdasarkan gambaran keuan-

gan publik yang jelas, andal, dan tepat waktu.

Setelah seluruh pembahasan rampung, hasilnya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pemkab Busel berharap seluruh tahapan berlangsung transparan, partisipatif, dan tepat waktu sehingga perubahan APBD dapat segera ditetapkan serta mendukung percepatan program pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (*)

Bupati Buton Tengah Azhari Siapkan Rp4,7 Miliar untuk Jalan Poros Mawasangka-Wasilomata

konektivitas antarkawasan terus meningkat.

Salah satu pekerjaan yang disiapkan melalui APBD adalah perbaikan Jalan Poros Mawasangka-Wasilomata sepanjang 1,7 kilometer dengan anggaran sekitar Rp4,7 miliar. Pemkab juga merencanakan penanganan ruas menuju Kaliwuliwuto, Kancebungi, hingga Watorembe mulai Oktober 2026 dengan anggaran sekitar Rp2,5 miliar hingga Rp2,7 miliar.

Bupati Buton Tengah Dr. Azhari mengatakan strategi pembiayaan tersebut diperlukan agar perbaikan jalan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah pusat. “Selain tiga ruas yang ditangani melalui IJD, kami juga menyiapkan pembiayaan APBD untuk mempercepat perbaikan jalan di beberapa wilayah,” kata Azhari saat menghadiri semarak kemerdekaan lomba panjat pinang di Pantai Sausmangka, Minggu (30/8/2026).

Pada saat yang sama, tiga dari lima ruas jalan yang diusulkan Pemkab Buton Tengah kepada pemerintah pusat telah disetujui untuk ditangani melalui program Instruksi Jalan Daerah (IJD). Ketiganya ialah jalan di kawasan Sekolah Rakyat, ruas dari depan Polsek menuju perbatasan Muna, serta jalan di Lowu-Lowu.

Pelabuhan Ferry Batu Atas Disiapkan, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Janjikan Konektivitas Tiga Provinsi

jungan kerja sekaligus memimpin peletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Pulau Batu Atas, Selaya (1/9/2026). Pemerintah daerah juga menyiapkan peningkatan jalan utama dan mendorong realisasi layanan listrik 24 jam.

Untuk mendukung akses darat, ruas jalan yang menjadi jalur utama masyarakat akan diperlebar hingga enam meter dengan dukungan anggaran sekitar Rp3 miliar. Sejumlah jalan yang telah dibangun tetapi belum memenuhi standar juga akan diperbaiki agar lebih aman dan nyaman digunakan.

“Semua ini dilakukan agar masyarakat Pulau Batu Atas semakin sejahtera dan terhubung dengan daerah lain,” kata Adios.

Di sektor energi, Pemkab Buton Selatan mendorong percepatan realisasi listrik 24 jam di Batu Atas. Ketersediaan listrik penuh dinilai penting untuk menopang aktivitas masyarakat, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi yang membutuhkan pasokan energi secara berkelanjutan.

Adios mengatakan pelabuhan baru nantinya akan memiliki kapasitas layanan yang lebih besar. Untuk sementara, masyarakat Batu Atas masih menggunakan Pelabuhan Bandar Batauga untuk aktivitas penyeberangan.

“Tahun 2027 kita akan bangun Pelabuhan Ferry Batu Atas dengan rute melintas tiga provinsi. Kapal ferinya akan lebih besar dibanding yang beroperasi di rute Siompu-Kadatua,”ujarnya.

Penguatan konektivitas tersebut memiliki arti strategis bagi Buton Selatan yang sejak pembentukannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 diarahkan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemanfaatan potensi daerah. Undang-undang tersebut ditetapkan pada 23 Juli 2014 sebagai dasar pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

gan skala besar, tentu membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena kemampuan APBD terbatas,”ujarnya.

Selain infrastruktur jalan, Pemkab Buton Tengah menjalankan sejumlah agenda pembangunan lain, antara lain membuka cabang UIN Kendari, meningkatkan status perguruan tinggi lokal, membangun Sekolah Negeri Terintegrasi (SNT), serta menyiapkan konstruksi fisik transmigrasi maritim. Di bidang sosial, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan sosial beras kepada sekitar 44 ribu keluarga sebagai bagian dari jaringan pengaman sosial.

Dengan pola pembiayaan bersama tersebut, pemerintah daerah menargetkan perbaikan jalan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus memperkuat akses masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi. Kebijakan ini sejalan dengan arah IJD secara nasional yang menempatkan konektivitas jalan daerah sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat keterhubungan kawasan produktif dan pemerataan infrastruktur. (*)

Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan konektivitas antarpulau merupakan bagian penting dari pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sejarah pembangunan wilayah kepulauan menunjukkan bahwa pelabuhan, jalan, dan energi tidak sekadar menjadi infrastruktur fisik, tetapi juga menentukan kelancaran mobilitas penduduk dan arus ekonomi. Karena itu, Adios mengajak masyarakat menjaga kekompleksan serta mendukung program pemerintah daerah agar pembangunan di Batu Atas dapat berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Mohon doakan Ketua DPRD, para anggota dewan, dan Bupati Buton Selatan semoga senantiasa diberi kekuatan dan kesihatan oleh Allah SWT,”pungkasnya. (*)

Festival Marching Band 2026 Resmi Dibuka, Wawali Baubau Tekankan Karakter

itu, seluruh peserta diminta menjadikan festival sebagai pengalaman untuk mengembangkan kemampuan sekaligus membangun kepercayaan diri.

“Menang dan kalah adalah bagian dari sebuah kompetisi. Tetapi sesungguhnya, keberanian untuk tampil, kemauan untuk berlatih, kedisiplinan untuk mempersiapkan diri, serta kemampuan untuk menghargai orang lain adalah kemenangan yang jauh lebih besar,” ujar Hamsinah.

Festival tersebut juga menjadi momentum pemererat hubungan antardaerah. Pembukaan dihadiri rombongan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang mewakili Bupati Pangkep melalui Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran. Hamsinah mengapresiasi kehadiran rombongan itu sebagai bagian dari upaya memperkuat silaturahmi, komunikasi, dan kerja sama antara Baubau dan Pangkep.

Ia mengatakan marching band memiliki pelajaran penting tentang arti kebersamaan. Penampilan yang harmonis hanya dapat diwujudkan apabila setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya. “Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, tetapi menjadi kekuatan ketika kita mampu menyatukannya dalam harmoni,” katanya.

Secara historis, budaya drum band dan marching band di Indonesia memiliki perjalanan panjang. Pada pertengahan 1950-an

hingga awal 1960-an, drum band telah berkembang di berbagai lingkungan masyarakat dan bahkan digunakan sebagai bagian dari ekspresi kekuatan politik. Tradisi tersebut kemudian berkembang ke ranah pendidikan, pertunjukan, dan kompetisi, sehingga marching band kini lebih banyak diposisikan sebagai kegiatan seni sekaligus pembinaan generasi muda.

Di tingkat internasional, tradisi marching band juga berakar dari perkembangan musik militer dan parade. Di Amerika Serikat, John Philip Sousa menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah musik marching band. Ia memimpin U.S. Marine Band pada 1880-1892 dan kemudian membentuk kelompok musik sipil yang melakukan pertunjukan serta tur di Amerika Serikat dan berbagai negara. Musik mars ciptaannya turut memperluas popularitas tradisi band di ruang publik.

Dalam konteks Baubau, Hamsinah menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung kegiatan yang memberi ruang ekspresi dan pengembangan potensi anak muda. Selain pendidikan karakter dan kreativitas, festival diharapkan memiliki efek lanjutan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta memperkenalkan Baubau sebagai daerah yang terbuka bagi kegiatan berskala daerah maupun nasional.

Pemerintah Kota Baubau juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, pembina, pelatih, guru, dan orang tua yang menopang persiapan peserta. Hamsinah berharap seluruh rangkaian Festival Marching Band 2026 berlangsung aman, tertib, dan lancar serta meninggalkan pengalaman positif bagi peserta dan masyarakat yang menyaksikan. (*)

Bupati Buton Sekatan H Muh Adios Pacu Ekonomi Nelayan, KNMP Rp5 Miliar Dibangun di Batu Atas

Batuatas Timur dan Desa Batuatas Liwu. Pembangunan diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui penyediaan fasilitas pendukung sektor perikanan sekaligus membuka ruang pengembangan potensi kelautan dan pariwisata di wilayah kepulauan tersebut.

Adios menilai Pulau Batu Atas memiliki modal ekonomi yang kuat karena hasil tangkapan ikannya melimpah dan berkualitas. Dengan dukungan infrastruktur, ia memperkirakan rantai perdagangan ikan dapat berkembang hingga menarik pemasok dari daerah lain, termasuk Sinjai, Sulawesi Selatan. “Bila ini terbangun, Insya Allah saya yakin orang Sinjai juga akan menjual ikannya di sini. Apalagi nanti sudah ada pabrik es, maka Pulau Batu Atas pasti akan berubah,” kata Adios.

Menurut dia, realisasi KNMP merupakan hasil perjuangan dan lobi bersama hingga Buton Selatan memperoleh dukungan anggaran tersebut. Ia membandingkan capaian itu dengan kebutuhan daerah lain yang juga menginginkan program serupa. Sebelumnya, model KNMP telah diuji coba di Teluk Lande.

“Walaupun daerah lain juga membutuhkan, namun Alhamdulillah Buton Selatan yang mendapatkannya, termasuk yang telah diuji coba sebelumnya di Teluk Lande,”ujarnya.

Program KNMP sendiri

merupakan terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mulai digulirkan secara nasional pada 2025. Pada tahap awal, pemerintah menetapkan 65 lokasi dengan anggaran Rp1,34 triliun, sebagai bagian dari target 100 lokasi pada 2025. Program tersebut dirancang untuk mengintegrasikan sarana produksi, pelatihan, UMKM, pasar ikan, hingga fasilitas rantai dingin dari hulu ke hilir.

Dalam perkembangannya, pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 KNMP hingga 2027. KKP juga menyiapkan fasilitas seperti dermaga, gudang beku, pabrik es, tempat pelelangan ikan, sentra kuliner, dan fasilitas pendukung lainnya. Secara kebijakan, program ini menempatkan kampung nelayan bukan hanya sebagai kawasan permukiman, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Peletakan batu pertama di Batu Atas turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Buton Selatan yang merupakan putra daerah Pulau Batu Atas, Staf Ahli Bupati sekaligus Kepala Dinas Koperasi dan UKM Buton Selatan, Camat dan kepala desa se-Kecamatan Batu Atas, serta tokoh adat dan masyarakat. Adios berharap KNMP menjadi titik balik penguatan ekonomi masyarakat sekaligus memperluas pemanfaatan potensi perikanan dan wisata Pulau Batu Atas. (*)

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Berhasil Disahkan DPR Sepanjang 2025-2026



Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan pidato di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026)

Laporan: Alwan

J A K A R T A , BP-Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) sepanjang Tahun Sidang 2025-2026. Capaian tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna khusus memperingati HUT ke-81 DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9).

Puan mengatakan capaian legislasi tersebut masih diikuti sejumlah agenda pembentukan peraturan yang belum selesai. DPR akan melanjutkan pembahasan 14 RUU yang saat ini telah memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I pada tahun sidang berikutnya.

Selain itu, terdapat 19 RUU yang sudah ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. Empat RUU lainnya masih berada dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi, sedangkan 27 RUU masih dalam tahap penyusunan di alat kelengkapan dewan.

Agenda legislasi juga mencakup delapan ratifikasi konvensi internasional. Dengan demikian, pekerjaan DPR pada bidang legislasi tidak berhenti pada 16 UU yang telah disahkan, tetapi masih mencakup berbagai rancangan regulasi dalam tahapan berbeda.

“Sepanjang tahun sidang 2025-2026, DPR RI telah menyelesaikan

16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang,” kata Puan dalam rapat paripurna tersebut.

Di luar fungsi pembentukan UU, DPR juga menyoroti perkembangan perkara pengujian UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Puan mencatat terdapat 418 perkara sepanjang Tahun Sidang 2025-2026.

Perkara yang diputus pada periode 15 Agustus 2025 hingga 30 Juli 2026 memiliki beragam status. Sebanyak tiga perkara dikabulkan seluruhnya, sementara 32 perkara dikabulkan sebagian oleh MK.

Sebanyak 105 perkara lainnya dinyatakan ditolak. Kemudian, 185 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, 80 perkara ditarik kembali, 12 perkara dinyatakan gugur, dan satu perkara dinyatakan berada di luar kewenangan MK untuk diputus.

Data tersebut menunjukkan bahwa proses legislasi memiliki konsekuensi konstitusional setelah UU disahkan. Produk hukum yang dibentuk DPR bersama pemerintah tetap dapat diuji terhadap UUD 1945 apabila menganggap ketentuan di dalamnya bertentangan dengan konstitusi.

Puan menegaskan kualitas legislasi menjadi bagian penting dari tanggung jawab DPR. Ia mengatakan setiap UU yang dihasilkan

harus memiliki landasan hukum dan legitimasi yang kuat serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk menghadirkan legislasi yang selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Puan.

Menurut dia, produk legislasi juga harus memberikan kepastian hukum dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Karena itu, pembahasan RUU yang masih berada di berbagai tahapan akan menjadi pekerjaan DPR bersama pemerintah pada tahun sidang berikutnya.

Secara historis, keberadaan DPR tidak dapat dilepaskan dari pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945, hanya 12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. KNIP yang beranggotakan 137 orang kemudian diakui sebagai cikal bakal badan legislatif Indonesia, dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi DPR RI.

Perjalanan parlemen Indonesia selanjutnya mengalami sejumlah perubahan kelembagaan. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengenal DPR masa awal kemerdekaan, DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, DPR hasil Pemilu

1955, hingga perubahan struktur parlemen setelah era Reformasi.

Dalam konteks internasional, perkembangan parlemen juga memiliki sejarah panjang. Inter-Parliamentary Union (IPU) dibentuk di Paris pada 30 Juni 1889 oleh anggota parlemen Inggris William Randal Cremer dan anggota parlemen Prancis Fr  ric Passy. Organisasi tersebut pada awalnya mendorong penyelesaian sengketa antarnegara melalui arbitrase dan dialog, bukan perang.

IPU yang kini menjadi organisasi global parlemen nasional tersebut menunjukkan bahwa fungsi lembaga perwakilan tidak hanya berkaitan dengan pembentukan hukum di tingkat domestik, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari diplomasi parlemen dan kerja sama internasional. Saat ini, IPU menyebut memiliki 183 parlemen anggota dari berbagai negara.

Bagi DPR RI, capaian 16 UU yang diselesaikan sepanjang Tahun Sidang 2025-2026 sekaligus menjadi bagian dari perjalanan panjang lembaga legislatif sejak kelahiran KNIP pada 1945. Tantangan berikutnya adalah memastikan puluhan RUU yang masih berada dalam berbagai tahapan dapat dibahas secara terukur, konstitusional, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

RUU Perampasan Aset Ditarget Rampung Desember, Draf Belum Disebar ke Publik

JAKARTA, BP- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana kembali memasuki sorotan setelah DPR RI menjanjikan penyelesaiannya paling lambat 15 Desember 2026. Namun, di tengah tuntutan agar proses legislasi berlangsung transparan, draf RUU tersebut belum disebarluaskan kepada publik karena masih menjalani sejumlah tahapan perumusan.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pembahasan RUU tersebut belum sampai pada tahap finalisasi. Setelah daftar inventarisasi masalah (DIM) disusun dan dibahas, masih terdapat proses di tim perumus (timus) serta tim sinkronisasi (timsin) yang harus dilewati. Penjelasan itu disampaikan Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/9). Menurut dia, membuka draf sebelum proses perapihan selesai dapat menimbulkan perbedaan tafsir terhadap substansi yang masih mungkin berubah.

“Ya nanti kan proses tahapan perapihan belum timus-timsin, justru bahaya kalau belum timus-timsin sudah dibuka, malah jadi misinterpretasi nantinya,” kata Cucun.

Alasan kehati-hatian tersebut muncul karena sejumlah versi draf RUU Perampasan Aset telah beredar. DPR menilai publikasi terhadap naskah yang belum melewati proses timus dan timsin berisiko membuat masyarakat menganggap suatu rumusan sebagai naskah final, padahal pembahasannya masih berjalan.

Meski demikian, DPR telah memasang batas waktu yang cukup tegas. Komitmen tersebut disepakati setelah pimpinan DPR menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di kompleks parlemen, Kamis (27/8). Kesepakatan itu menetapkan 15 Desember 2026 sebagai tenggat penyelesaian RUU Perampasan Aset.

Dalam pertemuan tersebut, tiga pimpinan DPR hadir, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Dasco menyatakan kesepakatan mengenai tenggat tersebut telah disampaikan dan disetujui dalam rapat paripurna.

“Paripurna tadi sudah menyampaikan, menyepakati dan disetujui bahwa tenggat waktu paling lambat untuk penandatanganan UU Perampasan Aset itu akan diketok di Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026,” kata Dasco.

Sebagai bentuk komitmen, pimpinan DPR yang hadir dalam audiensi tersebut juga menandatangani surat perjanjian. Mereka menyatakan siap mundur apabila kesepakatan penyelesaian RUU Perampasan Aset sesuai tenggat yang telah ditetapkan tidak terealisasi.

RUU ini bukan perkara legislasi baru. Gagasan pembentukan regulasi khusus mengenai perampasan aset telah berjalan selama bertahun-tahun. DPR mencatat, PPAATK menjadi salah satu penggagas awal dan menyerahkan rancangan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009. Draf pertama kemudian berhasil disusun pada 2012, tetapi tidak berlanjut hingga akhir pemerintahan SBY.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, RUU tersebut kembali masuk dalam Prolegnas jangka menengah pada 2015. Pemerintah juga sempat mengusulkannya masuk Prolegnas 2020, tetapi usulan tersebut tidak mendapat persetujuan DPR. Momentum lain terjadi pada Mei 2023 ketika Presiden Jokowi mengirim surat presiden kepada DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Namun, pembahasan lanjutan belum terealisasi hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi pada 2024.

Dalam perkembangan berikutnya, RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026. Pemerintah dan DPR menyepaka-

ti RUU tersebut sebagai salah satu rancangan yang diprioritaskan untuk mengisi kebutuhan dan kekosongan hukum.

Secara substansi, kebutuhan regulasi tersebut berkaitan dengan keterbatasan mekanisme perampasan aset yang selama ini lebih banyak bertumpu pada putusan pidana. Kementerian Hukum menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah menerapkan perampasan aset sejak rezim pemberantasan korupsi pada 1964, tetapi mekanismenya terutama berbasis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau conviction based asset forfeiture.

Konsep yang menjadi salah satu perhatian dalam RUU baru adalah non-conviction based asset forfeiture (NCBAF), yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu bergantung pada pemidanaan pelaku dalam kondisi tertentu. Konsep tersebut membutuhkan pengaturan yang hati-hati karena menyangkut keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak atas kepemilikan serta proses hukum yang adil.

Dorongan penguatan mekanisme tersebut juga memiliki konteks internasional. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam kerangka UNCAC, pemulihan aset menjadi salah satu bagian penting pemberantasan korupsi, termasuk pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, serta kerja sama antarnegara untuk mengembalikan hasil kejahatan.

Persoalan aset lintas negara menjadi semakin penting karena hasil kejahatan dapat dipindahkan dan disamarkan melalui yurisdiksi berbeda. UNODC mencatat bahwa kerja sama internasional dalam pemulihan aset membutuhkan mekanisme untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan atau menyita aset sebelum proses perampasan dan pengembaliannya kepada negara yang berhak.

Di Indonesia, kebutuhan tersebut juga telah lama diidentifikasi. Dokumen pemerintah mengenai strategi pemberantasan korupsi mencatat adanya persoalan dalam pemulihan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri, termasuk kebutuhan memperkuat kerja sama internasional dan regulasi terkait penyitaan atau perampasan aset.

Sementara itu, Komisi III DPR telah memaparkan ruang lingkup tindak pidana yang menjadi sasaran mekanisme perampasan aset dalam RUU tersebut. Berdasarkan pendalaman dan perbandingan dengan sejumlah negara, terdapat 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam cakupan yang telah disampaikan kepada publik.

Ketigabelas jenis tindak pidana tersebut meliputi korupsi; narkoba dan psikotropika; terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana di bidang kehutanan; serta tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya, ruang lingkup tersebut mencakup tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, serta kelautan dan perikanan. Jenis terakhir yang masuk daftar adalah tindak pidana perdagangan orang.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokman sebelumnya menjelaskan bahwa pembatasan jenis tindak pidana diperlukan dalam merumuskan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Menurut dia, para ahli mendorong agar tindak pidana yang menjadi sasaran merupakan kejahatan bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan serta dampak ekonomi yang tinggi. (*)

Kejati Sultra Bantu Pemprov Pulihkan Aset, 800 Temuan BPK Jadi Sorotan



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mempercepat upaya mengembalikan dan mengamankan aset daerah yang selama ini belum tertib, termasuk aset yang masih berada dalam penguasaan pihak ketiga. Langkah tersebut diperkuat melalui penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) antara Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Sugeng Riyanta di Kantor Gubernur Sultra, Selasa (1/9/2026).

Kerja sama itu langsung disertai penyerahan sejumlah hasil penertiban aset. Salah satunya sertifikat tanah seluas 49.970 meter persegi di kawasan Nanga-Nanga yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga dan berhasil diselamatkan melalui proses penertiban. Pemprov Sultra juga menerima barang rampasan berupa kapal Azimut yang telah melalui proses hukum hingga memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Selain sertifikat dan kapal, Kejati Sultra menyerahkan legal opinion atau pendapat hukum mengenai penatakelolaan aset Pemprov Sultra berupa lahan Sekolah Ummushabri Kendari. Penyerahan sejumlah dokumen dan aset tersebut menjadi bagian dari agenda Penyerahan Dokumen, Sertifikat, Barang Bukti, serta Penandatanganan SKK Barang Milik Daerah antara Pemprov Sultra dan Kejati Sultra.

Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan, persoalan aset daerah tidak dapat dipandang sebatas urusan administrasi. Aset yang tercatat sebagai milik pemerintah merupakan kekayaan

daerah yang melekat dengan kepentingan masyarakat sehingga membutuhkan pengamanan hukum, terutama ketika penguasaan fisiknya berada pada pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas.

Persoalan itu menjadi semakin penting karena Pemprov Sultra masih menghadapi sekitar 800 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan aset. Dari jumlah tersebut, menurut Gubernur, penertiban yang berhasil dilakukan masih sangat terbatas.

“Ini merupakan satu lompatan yang luar biasa. Aset Pemprov Sulawesi Tenggara yang menjadi temuan BPK sebanyak 800. Dari 800 sampai saat ini belum ada yang bisa ditertibkan, baru satu yang tadi disampaikan oleh Pak Kajati yaitu sertifikat,” kata Andi.

Gubernur meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap aset yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing. Ia juga menginstruksikan agar setiap rencana kerja sama yang berkaitan dengan aset pemerintah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan jajaran kejaksaan untuk mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.

Menurut Andi, keterlibatan kejaksaan diperlukan karena penertiban aset di lapangan berpotensi menimbulkan perbedaan kepentingan. Bantuan hukum diharapkan membuat pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat ketika mengambil kembali aset yang secara administrasi merupakan milik daerah.

“Pada saat kita menemukan ini pasti ada debatable di lapangan. Dengan adanya bantuan hukum ini, maka memudahkan khususnya pemerintah

untuk bisa menguasai kembali dan bisa mendapatkan kontribusi,” ujarnya.

Kajati Sultra Sugeng Riyanta mengatakan, Kejati melalui Jaksa Pengacara Negara siap menjalankan kuasa yang diberikan Pemprov Sultra untuk menyelamatkan, menatausahakan, dan mengembalikan aset daerah. Pendampingan tersebut mencakup aset yang belum tertib pengelolaannya maupun aset yang masih dikuasai pihak ketiga dan digunakan untuk kepentingan komersial.

“Kami siap mendapatkan perintah, arahan dan surat kuasa melalui surat kuasa khusus dari Pak Gubernur. Apabila ada aset-aset lain yang saat ini masih belum dapat kita kelola, apalagi masih belum tertib pengelolaannya karena dalam penguasaan pihak ketiga yang dilakukan secara melawan hukum, kami siap mendapatkan tugas untuk itu,” kata Sugeng.

Secara kelembagaan, keterlibatan Kejaksaan dalam perkara perdata dan tata usaha negara bukan hal baru. Dalam ketentuan organisasi Kejaksaan saat ini, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain kepada negara dan pemerintah, termasuk untuk menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara. Kejaksaan dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan kuasa khusus.

Kerangka pengelolaan aset pemerintah juga telah berkembang melalui regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah sebagai bagian

dari sistem perbendaharaan dan pengelolaan keuangan negara. Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnya diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 untuk menyempurnakan pengaturan mengenai penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan aset pemerintah.

Dalam konteks yang lebih luas, pengamanan dan pemulihan aset juga menjadi perhatian internasional. Kerangka United Nations Convention against Corruption (UNCAC) menempatkan asset recovery sebagai salah satu bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kerangka tersebut mendorong negara-negara memperkuat mekanisme penelusuran, penyitaan, pemulihan, serta pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Sugeng menegaskan, pendampingan Kejati Sultra merupakan bagian dari tugas negara di bidang perdata dan tata usaha negara sehingga Pemprov Sultra tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pendampingan tersebut. Kejati juga siap memberikan pertimbangan hukum dalam harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

Melalui kerja sama tersebut, Pemprov Sultra dan Kejati Sultra menargetkan persoalan aset tidak berhenti pada pencatatan administratif. Aset yang telah berhasil diamankan diharapkan dapat dikelola secara tertib dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah daerah serta masyarakat Sulawesi Tenggara. (*)

Tata Kelola RSUD Kendari Diperiksa BPK, Pemkot Tekankan Akuntabilitas



Laporan: Lisna

KENDARI, BP- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara memulai pemeriksaan pendahuluan terhadap tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari. Pemeriksaan selama 35 hari kerja itu tidak hanya menyentuh pengelolaan keuangan, tetapi juga pelayanan medik, sumber daya manusia, hingga operasional rumah sakit.

Pemeriksaan yang dimulai pada Senin (31/8/2026) tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik nasional di bidang kesehatan. Untuk Sulawesi Tenggara, RSUD Kota Kendari termasuk salah satu dari lima kabupaten/kota yang menjadi sampel pemeriksaan BPK.

Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Septi Rahmawaty, mengatakan pemeriksaan diarahkan untuk menilai efektivitas tata kelola rumah sakit sekaligus memetakan risiko dan persoalan yang berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung hingga 9 Oktober 2026.

“Ini pemeriksaan tematik nasional. Untuk Sulawesi Tenggara ada lima kabupaten/kota yang menjadi sampel pemeriksaan,” kata Septi saat entry meeting di Aula RSUD Kota Kendari, Senin (31/8/2026).

Lingkup pemeriksaan dibuat menyeluruh. BPK akan menelusuri tata kelola keuangan, anggaran, kas, klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), utang, tarif pelayanan, serta unit cost. Aspek pelayanan medik, kendali mutu dan biaya, sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian juga masuk dalam pemeriksaan.

Dari sisi operasional, pemeriksa juga akan melihat kerja sama rumah sakit, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS), sarana dan prasarana, pengadaan obat, serta Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). “Jadi pemeriksaannya menyeluruh,” ujar Septi.

Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, STP., SH., M.Si., meminta seluruh jajaran RSUD memberikan data dan keterangan yang diperlukan secara lengkap, akurat, transparan, dan tepat waktu. Pemerintah Kota Kendari, menurut dia, siap mendukung proses pemeriksaan tersebut.

Amir meminta pemeriksaan tidak ditempatkan sebagai proses yang menimbulkan kekhawatiran bagi manajemen rumah sakit. Sebaliknya, hasil pemeriksaan diharapkan menjadi cermin untuk melihat kelemahan tata kelola sekaligus menentukan bagian-bagian yang perlu diperbaiki.

“Atas nama Pemerintah Kota Kendari, kami menyambut baik kedatangan tim pemeriksa BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara. Kami siap memberikan dukungan dan data yang diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung,” ujarnya.

Dorongan pembenahan itu terutama diarahkan pada kualitas pelayanan. Amir menilai RSUD Kota Kendari memiliki posisi strategis karena merupakan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan ke-

butuhan dasar masyarakat.

Ia meminta kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien terus diperkuat sehingga pasien yang masih dapat ditangani di RSUD tidak mudah ditolak ataupun dirujuk. Pelayanan diharapkan berlangsung cepat, mudah, profesional, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Pemeriksaan ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Justru ini menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran agar tata kelola rumah sakit semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat,” kata Amir.

Menurut Amir, meningkatnya masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara, bahkan dari luar daerah, yang memanfaatkan layanan RSUD Kota Kendari menunjukkan adanya kepercayaan terhadap rumah sakit tersebut. Kepercayaan itu, kata dia, harus dibalas dengan peningkatan mutu pelayanan dan pembenahan manajemen.

Hasil pemeriksaan pendahuluan nantinya akan digunakan BPK untuk menentukan area kunci, ruang lingkup, kriteria, serta bukti yang diperlukan sebelum pemeriksaan terinci dilakukan. Pemerintah Kota Kendari berharap proses tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperbaiki pengelolaan RSUD.

Secara historis, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari desain ketatanegaraan Indonesia sejak awal berdirinya republik. BPK mulai berdiri pada 1 Januari 1947 di Magelang berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946, sebagai pelaksanaan amanat Pasal 23 ayat (5) UUD 1945. Pada masa awal, lembaga tersebut hanya memiliki sembilan pegawai dan dipimpin R. Soerasno.

Dalam perkembangannya, fungsi pengawasan dan akuntabilitas tidak hanya menjadi kebutuhan administrasi pemerintahan Indonesia. Secara global, tata kelola sistem kesehatan juga semakin ditempatkan sebagai instrumen untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses, efisien, berkeadilan, dan bermutu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan transparansi, akuntabilitas, pengawasan, serta kapasitas kelembagaan sebagai bagian penting dalam penguatan tata kelola sistem kesehatan.

Kajian WHO mengenai tata kelola rumah sakit publik di kawasan Asia dan Pasifik juga mencatat bahwa reformasi pengelolaan rumah sakit telah berlangsung selama beberapa dekade. Perubahan tersebut antara lain didorong kebutuhan meningkatkan efisiensi, mutu layanan, akses masyarakat, serta respons rumah sakit terhadap kebutuhan pasien.

Dalam konteks RSUD Kota Kendari, pemeriksaan BPK selama 35 hari kerja itu karena itu tidak sekadar menjadi agenda pengawasan administratif. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan sumber daya publik dikelola secara bertanggung jawab dan pada saat yang sama digunakan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas bagi masyarakat. (*)

Bupati Azhari Lepas 1.000 Pelari, Wisata Buton Tengah Makin Dipromosikan



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Sekitar 1.000 pelari dari dalam dan luar daerah memadati Lapangan J. Wayong Lombe, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Minggu (23/8/2026), untuk mengikuti Labungkari Run 2026. Kegiatan bertajuk “Ek-sotika Negeri Seribu Gua” itu tidak seka-dar menjadi ajang olahraga, tetapi juga dirancang sebagai sarana memperke-nalkan potensi wis-a sekaligus menge-rakkan ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah.

Bupati Buton Tengah Dr. Azhari mele-pas langsung peserta lomba yang terbagi dalam kategori 10K dan 5K. Pelari kate-gori 10K mulai ber-lomba pada pukul 05.40 WITA, disu-sul kategori 5K pada pukul 06.00 WITA. Rute yang memad-ukan jalan raya dan lintasan alam men-jadi bagian dari kon-sep kegiatan untuk menghadirkan pen-galaman olahraga sekaligus memperli-hatkan karakter alam Buton Tengah.

Pemerintah daer-hah menempatkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari strategi memper-temukan olahra-ga, pariwisata, dan ekonomi lokal. Ke-hadiran peserta dari berbagai daerah di-pandang memper-luas ruang promosi bagi Buton Tengah,

terutama karena wilayah tersebut selama ini dike-nal dengan identi-tas “Negeri Seribu Gua”.

Potensi tersebut bukan sekadar slo-gan pariwisata. Pe-merintah Kabupat-en Buton Tengah menyebut kawasan ini memiliki seja-rah panjang yang berkaitan dengan Kerajaan dan Ke-sultanan Buton. Situs resmi Pem-kab Buton Tengah mencatat wilayah Gu dan Mawasang-ka telah memiliki keterkaitan den-gan Kesultanan Buton sejak masa pemerintahan Raja Buton ke-6 seka-ligus Sultan Buton pertama, Murhum. Eksistensi wilayah Buton Tengah juga tercatat dalam Undang-Undang Murtabat Tujuh sekitar 1610 pada masa Sultan Bu-ton ke-4, La Elangi atau Sultan Dayanu Ikhsanuddin.

Dari sisi bentang alam, kekayaan gua menjadi salah satu modal uta-ma pengembangan pariwisata. Salah satu contohnya adalah Goa Lau-mehe yang be-rada di kawasan karst Buton Ten-gah. Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb Su-lawesi Tenggara mencatat gua terse-but sebagai salah satu destinasi yang dikenal dan dikun-jungi wisatawan.

Sejumlah kajian dan pemberitaan sebelumnya juga menempatkan Bu-

ton Tengah sebagai daerah dengan po-tensi wisata gua yang besar. Kom-pas mencatat julu-kan “Negeri 1.000 Gua” melekat pada Buton Tengah kare-na banyaknya gua yang dapat dikem-bangkan sebagai destinasi wisata, selain potensi pan-tai dan wisata ba-hari.

Dalam konteks yang lebih luas, penggunaan olah-raga sebagaiinstru-men promosi daer-hah memiliki akar sejarah panjang. Maraton modern mulai memper-oleh tempat dalam Olimpiade modern pertama di Athe-lis pada 1896. Ar-sip Olympic World Library mencatat lomba maraton tersebut menjadi bagian dari penye-lenggaraan Olim-piade 1896 dan kemudian berkem-bang menjadi salah satu cabang lari jarak jauh paling dikenal di dunia.

Labungkari Run 2026 karena itu me-nempatkan olah-raga bukan semata sebagai kompetisi, melainkan sebagai medium untuk mempertemukan orang dengan ru-ang, budaya, dan potensi ekonomi suatu daerah. Kon-sep tersebut terlihat dari pemilihan rute yang menggabung-kan jalan raya dan lintasan alam serta keterlibatan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

Pelepasan pe-serta turut dihadiri Wakil Bupati Buton

Tengah bersama ja-jaran Forum Koor-dinasi Pimpinan Daerah (Forkop-imda). Di antaran-ya Dandim 1413/Buton Letkol Inf. Yoni, Danyonif TP 870/Sangia Wamb-ulu Letkol Inf. Andi Gumilang, dan Ka-polres Buton Ten-gah AKBP Wahyu Adi Waluyo. Had-ir pula Ketua TP-PKK Buton Ten-gah Umi Noranah Azhari dan Staf Ahli TP-PKK Kar-tini Adam Basan.

Pemkab Buton Tengah meny-a-takan penyeleng-garaan Labungkari Run menjadi ba-gian dari komitmen berkelanjutan un-tuk mendukung inisiatif pemuda dan komunitas kreatif. Pemerintah daerah juga menempatkan pembinaan olahra-ga dan pengemban-gan ekonomi lokal sebagai instrumen untuk memperkuat daya saing daerah.

Dengan jum-lah peserta yang mencapai seki-tar 1.000 orang, Labungkari Run 2026 memberikan gambaran bahwa kegiatan olahraga dapat dikembang-kan menjadi agen-da promosi daer-hah. Pemkab Buton Tengah berharap pendekatan terse-but memperkuat posisi daerah se-bagai destinasi wisata sekaligus olahraga ung-gulan, bukan hanya di tingkat regional, tetapi juga menuju panggung nasional. (*)

Panen Padi Meningkatkan, Pemkab Buton Perkuat Pertanian Matana uwe hingga Wakosu



Laporan:La Harman

BUTON, BP - Pemerintah Kabu-paten Buton memperkuat pengem-bangan pertanian di Desa Matana uwe, Kecamatan Siotapina, dengan menggabungkan dukungan bibit unggul, pengairan, embung, hingga rencana pembangunan jalan tani. Intervensi tersebut mulai menun-jukkan hasil setelah petani setem-pat mampu meningkatkan produksi padi pada musim panen tahun ini.

Gambaran peningkatan produksi itu disampaikan dalam Pesta Panen Matana uwe Pokomekoa yang berlangsung di Lapangan Desa Matana uwe, Sabtu (29/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., bersama masyarakat dan petani setempat.

Peningkatan produksi menjadi penting bagi masyarakat Matana uwe karena hasil pertanian dalam beberapa tahun sebelumnya disebut cenderung mengalami penurunan. Kepala Desa Matana uwe, La Dangka, mengatakan kondisi tersebut mulai berubah setelah pemerintah memberikan sejumlah bantuan un-tuk mendukung kegiatan budidaya.

“Setiap tahun rata-rata hasil yang kami dapatkan agak berkurang. Al-hamdulillah, dengan adanya bantu-an yang Bupati berikan dari perta-nian dan PU, apa yang kami tanam terdapat perubahan hasil,” kata La Dangka.

Salah satu dukungan yang diter-ima petani berupa bibit padi ung-gulan sebanyak 11 ton. Menurut La Dangka, produksi yang diper-oleh dari bantuan tersebut bahkan mampu melampaui jumlah 11 ton, menunjukkan adanya peningkatan hasil dibandingkan kondisi sebel-umnya.

“Bibit padi unggulan 11 ton. Al-hamdulillah, yang kami dapat lebih dari 11 ton,” ujarnya.

Selain benih, pemerintah juga membantu penyediaan infrastruktur pengairan. Masyarakat Matana uwe mendapatkan empat titik irigasi per-pipa-an dan satu unit embung yang berfungsi mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam mening-katkan produktivitas lahan. Dengan adanya jaringan irigasi dan embung, petani memiliki dukungan untuk mengelola lahan secara lebih opti-mal dan mengurangi ketergantun-gan terhadap kondisi air yang terse-dia secara alami.

Dukungan terhadap petani terse-but mendapat apresiasi dari Ketua Panitia Pesta Panen Matana uwe Po-komekoa, La Mato. Ia menilai bantu-an pemerintah tidak hanya mem-bantu proses produksi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian.

“Alhamdulillah, kami bersyukur panen dengan cuaca, lahan subur dan air. Kami berterima kasih kepa-da pemerintah yang telah member-ikan bantuan. Sangat bermanfaat,” ungkap La Mato.

Penguatan pertanian melalui bi-bit, irigasi, dan embung memiliki konteks lebih luas dalam sejarah ketahanan pangan. FAO mencatat padi telah menjadi sumber pangan manusia selama lebih dari 10.000 tahun dan menjadi tanaman penting

bagi ketahanan pangan serta perkem-bangan sosial-ekonomi di banyak ne-gara Asia.

Di Indonesia, peningkatan produksi padi juga pernah menjadi bagian pent-ing dari kebijakan pembangunan nasi-onal. Investasi pada irigasi, pengem-bangan varietas unggul, pemanfaatan pupuk dan teknologi pertanian berkon-tribusi terhadap pencapaian swasem-bada beras pada 1984. FAO mencatat capaian tersebut menjadi salah satu tonggak penting sejarah ketahanan pangan Indonesia.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas per-tanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan. Infrastruktur pengairan, kualitas benih, teknologi budidaya, akses trans-portasi, serta dukungan pemerintah menjadi bagian dari ekosistem produk-si yang saling berkaitan. Dalam sejarah Revolusi Hijau di Asia, perbaikan iri-gasi dan penggunaan varietas berdaya hasil tinggi menjadi faktor penting dalam meningkatkan produksi.

Konteks tersebut pula yang menja-di dasar Pemerintah Kabupaten Buton untuk melanjutkan dukungan terhadap sektor pertanian di Matana uwe dan wilayah lainnya. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menegaskan pemer-intah daerah akan terus mendorong pengembangan potensi pertanian, ter-masuk di kawasan Wakosu.

Menurut Alvin, hasil kajian pemer-intah menunjukkan kawasan sekitar Wakosu memiliki potensi pertani-an yang baik. Potensi tersebut dinilai perlu ditopang dengan pembangunan infrastruktur sehingga produktivitas masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

“Kami akan berupaya dan beker-ja keras memberikan kesejahteraan di seluruh Kabupaten Buton, termasuk Matana uwe dan Siotapina,” tegas Al-vin.

Setelah bantuan bibit dan pengairan, kebutuhan berikutnya yang menja-di perhatian pemerintah adalah akses menuju kawasan pertanian. Jalan tani menuju Wakosu dinilai penting untuk mempermudah mobilitas petani, terma-suk mengangkat sarana produksi mau-pun hasil panen.

Alvin mengatakan pembangunan akses tersebut akan diupayakan melalui berbagai sumber pembiayaan. Pemer-intah daerah tidak hanya mengandal-kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat maupun pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusa-haan atau CSR.

“Sekarang tinggal jalan tani ke Wa-kosu. Selain pakai APBD, akan kami minta bantuan pusat atau CSR. Kami akan terus mencari solusi,” ujarnya.

Pembangunan jalan tani diharapkan dapat melengkapi dukungan yang su-dah diberikan melalui benih dan sistem pengairan. Infrastruktur transportasi menjadi penting karena peningkatan produksi harus diikuti dengan kemu-dahan petani membawa hasil pertanian keluar dari kawasan produksi menuju tempat pengumpulan maupun pasar.

Pemerintah Kabupaten Buton juga menegaskan dukungan terhadap perta-nian tidak berhenti pada satu kegiatan atau satu musim panen. Pemerintah akan terus mencari sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan infrastruk-tur masyarakat, baik melalui anggar-an daerah, pemerintah pusat maupun dukungan sektor swasta. (*)

 PT FAREN GRAFIKA Harian Pagi Baubau Post KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Rinin Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri
Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Agan Baubau: Jamaluddin Agan Buton Selatan: Firman Agan Buton: Samrihan Agan Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks			

Empat Penumpang Tewas, Nakhoda KM Nurul Salsa Kini Jadi Tersangka dalam Tragedi Selayar



Laporan: Amran

MAKASSAR, BP- Penyidikan kecelakaan KM Nurul Salsa di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, memasuki tahap baru setelah polisi menetapkan nakhoda kapal, MA (36), sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang dinilai cukup untuk mengaitkan nakhoda dengan kecelakaan yang menewaskan empat penumpang tersebut.

Selain korban meninggal dunia, kecelakaan itu juga menyisakan persoalan pencarian terhadap 14 orang yang hingga kini dinyatakan hilang. Polisi masih mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan serta kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Kapolres Selayar AKBP Didid Imawan mengatakan MA diduga melakukan kelalaian yang berujung pada hilangnya nyawa penumpang. Dasar penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan kelalaian dalam pengoperasian kapal.

“Yang bersangkutan dinilai lalai yang menyebabkan meninggalnya atau hilangnya nyawa seseorang,” kata Didid.

Menurut Didid, penyidikan belum berhenti setelah penetapan MA sebagai tersangka. Polisi justru memperluas pemeriksaan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya pihak lain yang mempunyai keterkaitan pidana dengan kecelakaan tersebut.

Instruksi untuk melanjutkan penyidikan telah diberikan kepada Kasat Reskrim, Kasat Polairud, serta seluruh tim penyidik yang menangani perkara tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan proses hukum tidak hanya berhenti pada nakhoda apabila nantinya ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

“Saya juga telah memerintah Kasat Reskrim dan Kasat Polairud dan kepada seluruh tim penyidik untuk tetap melanjutkan penyidikan terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dibuktikan secara pidana dalam kasus ini,” ujar Didid.

Dari sisi proses hukum, berkas perkara MA juga telah dikirimkan kepada kejaksaan. Penyidik kini menunggu hasil penelitian jaksa terhadap berkas tersebut sebelum proses

hukum memasuki tahapan berikutnya.

Kasat Reskrim Polres Selayar Sukarman membenarkan bahwa MA telah berstatus tersangka. Penetapan itu merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik setelah mengumpulkan dan mengevaluasi alat bukti dalam perkara kecelakaan kapal tersebut.

“Iya benar, nakhoda KM Nurul Salsa, MA ditetapkan sebagai tersangka,” kata Sukarman, Selasa (1/9).

Sukarman menjelaskan, hasil gelar perkara menunjukkan terdapat dua atau lebih alat bukti yang dianggap cukup untuk meningkatkan status hukum MA dari pihak yang diperiksa menjadi tersangka.

“Hasil gelar perkara penyidik temukan dua atau lebih alat bukti yang cukup, sehingga MA ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena kecelakaan KM Nurul Salsa tidak hanya menimbulkan korban meninggal dunia, tetapi juga menyebabkan 14 orang belum ditemukan. Kondisi itu membuat penyidik harus mengurai secara menyeluruh rangkaian peristiwa, termasuk aspek pengoperasian kapal dan dugaan kelalaian yang kini menjadi bagian penting dalam perkara.

Dalam konteks keselamatan transportasi nasional, kecelakaan pelayaran bukan persoalan baru bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat bahwa meningkatnya frekuensi pelayaran nasional juga diikuti persoalan kecelakaan dan insiden kapal di perairan Indonesia. Karena itu, investigasi kecelakaan pelayaran diarahkan untuk menemukan penyebab dan mencegah kejadian serupa terulang.

KNKT juga mencatat bahwa sepanjang 2023 terdapat sejumlah kecelakaan pelayaran yang masuk dalam investigasi. Pada tahun tersebut, kecelakaan kapal terbesar menjadi kategori kecelakaan pelayaran yang paling banyak diinvestigasi, dengan enam kejadian. Dalam seluruh moda transportasi yang diinvestigasi KNKT pada 2023, moda pelayaran mencatat 15 korban meninggal dunia dan tujuh korban luka-luka.

Secara kelembagaan, perhatian terhadap keselamatan pelayaran di Indonesia terus berkembang. KNKT dibentuk dengan kerangka kelembagaan yang antara lain bertujuan memperkuat investigasi keselamatan transportasi dan menghasilkan rekomendasi agar kecelakaan dengan faktor penye-

bab serupa tidak kembali terjadi. Investigasi keselamatan tersebut pada prinsipnya berbeda dari proses penegakan hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

Perhatian terhadap keselamatan pelayaran juga memiliki sejarah panjang di tingkat internasional. Tenggelamnya Titanic pada 1912 menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong negara-negara maritim menyusun standar keselamatan pelayaran internasional. Dua tahun kemudian, negara-negara maritim mengadopsi konvensi pertama mengenai keselamatan jiwa di laut atau SOLAS.

Konvensi SOLAS kemudian berkembang melalui sejumlah pembaruan, termasuk versi 1929, 1948, 1960, dan 1974. SOLAS 1974 mulai berlaku pada 1980 dan hingga kini menjadi salah satu instrumen internasional terpenting dalam keselamatan kapal. Ketentuannya mencakup standar minimum konstruksi, perlengkapan, dan pengoperasian kapal yang berkaitan dengan keselamatan.

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa setiap kecelakaan pelayaran dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi standar keselamatan, kompetensi pengoperasian kapal, perlengkapan keselamatan, hingga prosedur tanggap darurat. Namun, konteks historis tersebut tidak serta-merta menentukan penyebab kecelakaan KM Nurul Salsa karena penyebab dan pertanggungjawaban dalam kasus Selayar tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

Untuk perkara KM Nurul Salsa, polisi kini menempatkan dugaan kelalaian nakhoda sebagai salah satu fokus pertanggungjawaban pidana. Pada saat yang sama, penyidik masih membuka kemungkinan adanya tersangka lain apabila bukti yang diperoleh selama proses penyidikan menunjukkan keterlibatan pihak lain.

Dengan berkas MA yang telah dikirimkan kepada kejaksaan dan penyidikan yang masih berjalan, perkara kecelakaan KM Nurul Salsa belum sepenuhnya berakhir pada satu tersangka. Polisi masih memiliki ruang untuk memperdalam fakta kecelakaan, sementara keputusan mengenai kelanjutan proses hukum MA menunggu penelitian jaksa terhadap berkas perkara tersebut. (*)

Saksi Bongkar Aliran US\$406 Ribu dalam Perkara Kuota Haji

JAKARTA, BP- Kesaksian mantan staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Syaiful Bahri alias Bahri alias Bajak Laut, membuka jejak pere-daran uang US\$406.000 dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (1/9), uang tersebut disebut diperuntukkan bagi Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Kesaksian itu menjadi bagian penting dari penelusuran jaksa terhadap dugaan aliran dana dalam perkara yang menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar. Perkara tersebut menyeret sejumlah nama, termasuk Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba.

Dalam pemeriksaan, Syaiful menyebut uang US\$406.000 itu berasal dari Asrul Azis Taba, Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama. Uang tersebut kemudian dititipkan kepada Syaiful untuk diberikan kepada Ishfah.

Syaiful mengaku awalnya tidak menyangka titipan yang diterimanya berupa uang dalam jumlah besar. Ia sebelumnya terbiasa menerima titipan untuk Gus Alex berupa surat keputusan, oleh-oleh, kain, dan barang lainnya. Karena itu, ketika seseorang menghubunginya melalui WhatsApp dan meminta mengambil titipan di sebuah kantor di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, pada Maret 2023, ia datang tanpa menaruh kecurigaan.

Situasi berubah ketika Syaiful membuka bagasi mobil. Di dalamnya terdapat uang yang disertai keterangan nominal US\$406.000. Ia kemudian melaporkan keberadaan uang tersebut kepada Ishfah. Namun, uang itu tidak langsung diterima dan Syaiful diminta menyimpannya.

“Beliau mencari jalan untuk mengembalikan. Kamu pegang aja dulu,” ujar Syaiful menirukan percakapannya dengan Ishfah di hadapan majelis hakim.

Uang tersebut kemudian mengalami beberapa kali perpindahan. Syaiful menerangkan, US\$60.000 diserahkan kepada seseorang bernama Sandy yang mengaku berasal dari Komite Nasional Peduli Rakyat Palestina. Berikutnya, US\$45.000 diserahkan kepada Ridwan atas permintaan Ishfah. Setelah dua penyerahan itu, uang yang tersisa disebut mencapai US\$301.000.

Perjalanan uang kembali berubah ketika Ishfah meminta Syaiful mengembalikan US\$400.000 kepada seseorang bernama Erik. Karena uang yang berada di tangan Syaiful hanya US\$301.000, Ishfah disebut menambahkan US\$100.000 sehingga jumlah yang dapat diserahkan mencapai US\$401.000. Dari jumlah tersebut, US\$400.000 diberikan kepada Erik, sedangkan US\$1.000 diserahkan kembali kepada Ishfah.

Penyerahan US\$400.000 itu berlangsung di kantor PBNU. Syaiful mengaku tidak mengenal Erik sebelumnya. Ia tetap menyerahkan uang tersebut karena mendapat instruksi dari Ishfah dan mengetahui ada orang yang telah menunggu untuk menerima dana tersebut.

“Uang US\$400 ribu diberikan ke Erik di PBNU,” kata Syaiful ketika membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa.

Jaksa kemudian mendalami keterangan Syaiful mengenai tujuan pemberian uang kepada Erik. Tujuan BAP, disebutkan bahwa sehari setelah penyerahan uang tersebut, Ishfah menyampaikan bahwa dana itu berkaitan dengan Pansus Haji DPR. Syaiful membenarkan bahwa informasi tersebut disampaikan langsung oleh Ishfah,

tetapi ia mengaku tidak mengetahui hubungan antara uang dolar tersebut dengan Pansus Haji.

“Pansus,” ujar Syaiful mengulang jawaban singkat Ishfah ketika ditanya siapa pihak yang berkaitan dengan pemberian uang tersebut.

Kasus ini berlangsung dalam konteks penyelenggaraan haji Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam pengaturan kuota. Pada 2019, Indonesia menerima tambahan 10.000 kuota yang seluruhnya dialokasikan untuk jemaah haji reguler. Pada 2023, Indonesia kembali memperoleh tambahan 8.000 kuota yang dibagi 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah haji khusus.

Perubahan paling besar terjadi pada 2024. Indonesia memperoleh tambahan 20.000 jemaah setelah sebelumnya memiliki kuota normal 221.000 orang. Tambahan tersebut dibagi masing-masing 10.000 untuk jemaah reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus, sehingga total kuota mencapai 241.000 jemaah. Kementerian Agama saat itu menyebut angka tersebut sebagai kuota terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji Indonesia.

Pengaturan kuota haji juga tidak terlepas dari sejarah pengelolaan jemaah secara global. Sistem kuota internasional diperkenalkan pada 1987 untuk membatasi jumlah jemaah dari setiap negara hingga sekitar 0,1 persen dari populasi, antara lain untuk mengendalikan kepadatan dan aspek keselamatan dalam ibadah haji.

Besarnya konsentrasi jemaah membuat pengelolaan kuota menjadi persoalan penting di tingkat internasional. Arab Saudi bahkan pernah membatasi penyelenggaraan haji secara ekstrem ketika pandemi Covid-19. Pada 2020, jumlah jemaah dibatasi sekitar 10.000 orang dan hanya diperuntukkan bagi orang yang berada di Arab Saudi. Pada 2021, jumlahnya kembali dibatasi menjadi sekitar 60.000 jemaah dengan persyaratan kesehatan dan vaksinasi.

Konteks tersebut menunjukkan bahwa kuota haji bukan semata persoalan jumlah keberangkatan, melainkan menyangkut tata kelola, pembagian jemaah, kesiapan layanan, serta koordinasi antara negara pengirim dan Arab Saudi. Di Indonesia, persoalan pembagian kuota tambahan 2024 sebelumnya juga menjadi sorotan DPR melalui Panitia Khusus Hak Angket Haji. Kementerian Agama menjelaskan bahwa alokasi kuota tambahan memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam perkara yang kini diperiksa KPK, Ishfah didakwa memperkaya diri sebesar US\$5.233.800 dan Rp330 juta. Jika dikonversikan dan dijumlahkan, nilai dugaan penerimaan tersebut mencapai sekitar Rp93.674.823.000 atau Rp93,6 miliar.

Perbuatan melawan hukum itu diduga dilakukan Ishfah bersama tiga terdakwa lainnya, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Asrul Azis Taba. Mereka bersama sejumlah pihak lain diduga turut diperkaya melalui perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024.

Kesaksian Syaiful selanjutnya menjadi bagian dari upaya jaksa memetakan bagaimana uang US\$406.000 tersebut berpindah tangan, mulai dari penerimaan awal, penyimpanan, penyerahan sebagian dana, hingga pengembalian US\$400.000 kepada Erik. Adapun kaitan dana tersebut dengan Pansus Haji DPR masih menjadi bagian yang didalami dalam persidangan dan Syaiful sendiri menyatakan tidak mengetahui detail hubungan tersebut. (Rudi)

Investor Belanda Bidik Baubau untuk Hilirisasi Jambu Mete Sulawesi Tenggara



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP - Peluang menjadikan Kota Baubau sebagai salah satu pusat pengolahan jambu mete di Sulawesi Tenggara mulai terbuka setelah calon investor asal Belanda bersama Atase Belgia dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dijadwalkan mengunjungi daerah itu, Rabu (2/9/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari peninjauan investasi untuk mendorong hilirisasi komoditas perkebunan.

Agenda tersebut dinilai strategis karena Baubau tidak hanya memiliki basis produksi jambu mete, tetapi juga posisi geografis dan infrastruktur yang dapat mendukung pergerakan bahan baku maupun produk olahan. Aspek logistik, kepelabuhanan, konektivitas, serta ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan menjadi sejumlah keunggulan yang akan diperkenalkan kepada calon investor.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Ibnu Wahid, ST, MM, mengatakan rencana kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari promosi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman ketika melakukan kunjungan ke Belanda. Dalam kesempatan tersebut, potensi pengembangan dan hilirisasi jambu mete Sulawesi Tenggara diperkenalkan kepada pihak investor.

“Dari sejumlah daerah yang memiliki potensi, Kota Baubau menjadi salah satu daerah tujuan yang dipandang memiliki daya dukung untuk pengembangan indus-

tri hilir jambu mete,” kata Ibnu dalam siaran persnya, Senin (31/8/2026).

Peninjauan itu sebelumnya dibahas melalui pertemuan daring antara Pemerintah Kota Baubau dan tim terkait pada Jumat (28/8/2026). Pertemuan tersebut membicarakan peluang pengembangan industri sekaligus kesiapan daerah apabila investasi pengolahan jambu mete benar-benar direalisasikan.

Bagi pemerintah daerah, peluang tersebut tidak berhenti pada peningkatan perdagangan bahan mentah. Kehadiran industri pengolahan diharapkan menciptakan rantai nilai yang lebih panjang, mulai dari penyerapan hasil petani, pengolahan, distribusi hingga pemasaran produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

“Ini telah dilaporkan kepada Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE, dan beliau menyambut positif rencana kunjungan investor dan jajaran Kementerian Pertanian,” ujar Ibnu. Menurut dia, kunjungan tersebut dapat menjadi pintu masuk kerja sama investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara historis, jambu mete bukan komoditas baru bagi kawasan Sulawesi Tenggara. Kajian Kementerian Pertanian pada 1997 menyebut jambu mete merupakan salah satu komoditas andalan daerah yang pada awalnya dikembangkan sebagai bagian dari program penghijauan lahan kritis. Perkembangannya kemudian menjadikan tanaman tersebut sebagai komoditas

ekonomi penting bagi masyarakat.

Data statistik perkebunan Sulawesi Tenggara 2023 menunjukkan luas areal jambu mete di provinsi tersebut mencapai 106.218 hektare dengan produksi 33.503 ton dan melibatkan 82.780 kepala keluarga petani. Di Kota Baubau sendiri tercatat areal 758 hektare, produksi 160 ton, dan 760 kepala keluarga petani. Angka itu menunjukkan adanya basis komoditas dan pelaku usaha yang dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri hilir.

Secara nasional, Badan Pusat Statistik juga menempatkan jambu mete sebagai salah satu komoditas perkebunan strategis yang dicatat dalam statistik tahunan, bersama kelapa sawit, kopi, kakao, karet, teh, cengkeh, kelapa, sagu, pala, lada, dan komoditas lainnya. Data tersebut mencakup luas areal, produksi, serta perdagangan ekspor-impor menurut negara tujuan dan asal.

Potensi hilirisasi menjadi semakin relevan jika melihat sejarah perdagangan jambu mete dunia. Tanaman yang berasal dari Brasil bagian timur laut itu menyebar ke berbagai kawasan tropis melalui pelayaran bangsa Portugis pada abad ke-16 dan ke-17. Dalam perkembangan industri modern, pusat produksi dunia juga bergeser dari waktu ke waktu; FAO mencatat perubahan besar pangsa produksi dari Afrika menuju Asia, dengan India, Indonesia, dan Vietnam menjadi bagian penting dalam perkembangan industri jambu mete.

Data FAO yang dikompilasi dalam dokumen Codex untuk 2023 bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh negara produsen jambu mete terbe-

sar dunia, dengan produksi sekitar 165.000 ton jambu mete gelondong. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki basis produksi yang cukup untuk mengembangkan strategi peningkatan nilai tambah, bukan semata-mata menjual komoditas dalam bentuk bahan mentah.

Dalam kunjungan pada Rabu (2/9/2026), rombongan investor Belanda, Atase Belgia, dan jajaran Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dijadwalkan mengikuti diskusi bersama Pemerintah Kota Baubau. Forum itu akan digunakan untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus membahas kesiapan Baubau dalam mendukung investasi dan industri pengolahan jambu mete.

“Harapannya, peninjauan ini dapat berkembang menjadi kerja sama konkret yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” kata Ibnu. Ia menilai investasi tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah jambu mete, membuka lapangan kerja, memperluas peluang usaha, serta memperkuat posisi petani dalam rantai ekonomi komoditas perkebunan.

Pemerintah Kota Baubau juga berharap proses peninjauan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membangun Baubau sebagai salah satu simpul hilirisasi komoditas perkebunan di Sulawesi Tenggara. Dengan dukungan investasi, teknologi pengolahan, pasar, dan jaringan logistik, jambu mete diharapkan tidak berhenti sebagai komoditas primer, tetapi berkembang menjadi produk industri yang memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun global. (*)

STAI YPIQ Baubau Wisuda Sarjana Angkatan XXVI, Lulusan Diminta Jadi Agen Perubahan



Pewarta: Firman

BAUBAU, BP - Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau menggelar Rapat Senat Terbuka Luar Biasa dalam rangka Wisuda Sarjana Angkatan XXVI Program Strata Satu (S1) disala satu gedung di Kota Baubau. Lulusan STAI YPIQ Baubau diminta jadi agen perubahan, Sabtu (30/8/2026).

Wisuda tersebut diikuti lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). Rapat senat terbuka luar biasa tersebut dibuka Dr. Salmi, S.Th.I., M.Th.I.

Ketua STAI YPIQ Baubau, La Ode Abdul Salam Al Amin, S.Pd., MM, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati beserta orang tua yang telah mendampingi hingga menyelesaikan satu tahapan pendidikan di STAI YPIQ Baubau.

Ia mengatakan, STAI YPIQ Baubau terus berupaya memberikan pendidikan terbaik di tengah berbagai keterbatasan yang dimiliki, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan.

“Kompetensi merupakan akumulasi kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaan yang dapat diukur melalui asesmen terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab di bidang kerjanya,” katanya.

Ketua STAI menambahkan, sebagai upaya meningkatkan kompetensi lulusan, STAI YPIQ Baubau telah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2022. Kurikulum tersebut berfokus pada pengembangan soft skill, materi esensial, serta proses pembelajaran yang lebih fleksibel.

Namun, kata dia, pendidikan tidak semata-mata berkaitan dengan transfer ilmu pengetahuan atau pencapaian standar kompetensi.

“Hal yang lebih utama adalah membentuk karakter dan watak peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik dan santun, baik dalam tataran etika maupun estetika dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Lebih lanjut, STAI YPIQ Baubau berupaya membekali mahasiswa tidak hanya dengan teori keilmuan, tetapi juga karakter dan akhlak sebagai bekal menghadapi kehidupan bermasyarakat.

Saat ini, kata dia, STAI YPIQ Baubau memiliki Empat program studi, yakni PAI, BPI, PIAUD, dan Bahasa Arab. Pihak kampus juga telah mengusulkan penambahan program studi Ekonomi Syariah dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

“Alhamdulillah, kami mendapat kabar bahwa usulan tersebut saat ini sedang dalam proses asesmen,” katanya.

Pengembangan program studi tersebut, lanjutnya, merupakan

bagian dari upaya STAI YPIQ Baubau untuk terus berkembang dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat.

“Ilmu yang kalian peroleh bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menjadi cahaya bagi keluarga, masyarakat dan bangsa,” pesannya.

Ia juga mengingatkan para lulusan agar senantiasa menjaga kejujuran, integritas dan empati dalam setiap langkah kehidupan.

“Jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan sejatinya adalah proses pembelajaran. Jadikan setiap pengalaman sebagai guru dan kegagalan sebagai pijakan menuju keberhasilan,” katanya.

Sementara itu, Ketua YPIQ Baubau, Ir. Muslihi, mengatakan wisuda merupakan momentum sakral yang telah lama dinantikan mahasiswa. Wisuda bukan sekadar seremoni pelantikan lulusan, tetapi menjadi penanda berakhirmnya satu perjalanan panjang dalam menuntut ilmu sekaligus awal memasuki kehidupan yang lebih luas.

“Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati,” tuturnya.

YPIQ Baubau, kata dia, memiliki komitmen kuat untuk mendukung pengembangan STAI YPIQ Baubau, termasuk dalam pengembangan program studi baru.

“Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan sangat tinggi dan terus berkembang. Karena itu, YPIQ Baubau memberikan dukungan penuh kepada STAI untuk melakukan pengembangan program studi baru,” ujarnya.

Ia berharap STAI YPIQ Baubau tidak hanya menjadi perguruan tinggi yang melahirkan lulusan, tetapi juga berkembang sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter Islami dan pengabdian kepada masyarakat.

Kepada para wisudawan, Muslihi berpesan agar tidak hanya membawa ijazah dan gelar akademik setelah meninggalkan kampus.

“Bawalah ilmu, akhlak, integritas, tanggung jawab dan semangat untuk memberikan manfaat kepada sesama,” pesannya.

Mewakili Wali Kota Baubau, Asisten II Setda Kota Baubau, Dr. Dahrul Dahlan, S.STP., M.Si, memberikan apresiasi kepada civitas akademika STAI YPIQ Baubau atas dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam mendidik generasi bangsa.

Ia mengatakan, gelar sarjana yang disandang para wisudawan bukanlah akhir perjalanan, melainkan gerbang awal untuk menghadapi tantangan dan peluang di tengah masyarakat.

“Dunia yang kalian hadapi saat ini bergerak sangat cepat dan penuh dengan kompetisi,” pungkasnya.

Menurutnya, lulusan STAI YPIQ Baubau memiliki keunggulan karena tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai moral, etika dan spiritual.

Dahrul juga mengajak alumni STAI YPIQ Baubau untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Kota Baubau. Pemerintah Kota Baubau, kata dia, terus melakukan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi hingga infrastruktur. (*)